

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Alexander E.R. 2000. *Why Planning Vs. Markets is an Oxymoron: Asking The Right Question, Planning & Markets*. California, Los Angeles: University of Southern

Alexander Abe, 2008, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaharuan, Pondok Edukasi Yogyakarta.

Anhar, 2011 *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*.

Baharuddin, Nara Nurdin, 2019. *Kompetensi Dan Komitmen Dalam Kinerja Pelayanan Publik*, UPT Unhas Press. Makassar.

Bintoro.Tjokroamidjojo. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Cetakan ke-12. Masagung.Jakarta.

Berry, Waldron, 1970, *A Planning Programming and Budgeting System For A University Student Health Services*, University Of Florida.

Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Campbell,D.T & Fieske,D, 1959, *Covergent and Discriminant Validation By The multitrait-Multimethod Matrix*, Psychological Bulletin.

Chambers, R. 1996. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxam – Kanisius. Yogyakarta.

Chaplin, J.P. 2008, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Charles R. Berger, 1993. *Communication Failure and Plan Adaptation*, Derwing.

Conyers, Diana 1994, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Cetakan Ketiga, Gajah Mada University Press.

Creswell.J.W, 2017, *Research Design : Pendekatan Meode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, 2003, *The New Public Service: Serving, not Steering*, M.E. Shape, New York.

Djunaedi. A, 2012, *Proses Penyusunan Rencana Komprehensif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-Organisasi Modern*. Alih bahasa oleh Suryatim. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna. Jakarta.

Fayol, Henry, 2016. *Management Theory*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son.

Friedmann, J. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton NJ: Princeton University Press.

Hasiholan Pasaribu, 2018, Pengaruh Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Daerah Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Banten, IPDN, Jakarta

Hermansyah, 2017, *Model Partisipasi Publik Yang Demokratis Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sinjai*.

A. Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.

Imawan, Riswandha. 2002. "Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance" Di dalam Syamsuddin Haris (Ed) *Desentralisasi Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Partnership For Governance Reform in Indonesia. Jakarta.

Iskandar Ibrahim, 2012, *Human Resource Scorecard* di Bappeda Kabupaten Puhwato Provinsi Gorontalo.

Islamy, M.Irfan.1988, *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta; Universitas Terbuka.

Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

Kotler, Philip. 2000, *Marketing Management. The Millenium Edition, International Edition*, Prentice Hall, Inc, New Jersey.

Laudon, Kenneth C. dan Jane P. Laudon, 2007, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi Kesepuluh, Buku 1, Terjemahan : Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P., Salemba Empat, Jakarta.

Lindblom, C.E, and E.J. Woodhouse, 1993, *The Policy Making Process* 3 edn, Prentice Hall Englewood Cliffs, N.J

Mardikanto.Totok dan Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Milwan, 2013, *Analisis Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Daerah, Studi Kasus Perumusan Peraturan Daerah DKI Jakarta*

Muljana. B.S, 2011. *Perencanaan Pembangunan Nasional Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Universitas Indonesia* UI-Press.

Moleong, Lexy J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja, Jakarta

Nawawi Juanda, 2019, *Analisis Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Perubahan Kebijakan APBD Di Kabupaten Wajo*, Hasil Penelitian.

Nugroho, D. Riant, 2014, *Kebijakan Publik, di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Richardus Eko Indrajit. 2002, *Elektronik Government : Strategi Pembabunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi. Yogyakarta.

Sangkala, 2016, *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*, Capiya Publishing, Surabaya.

Siagian, Sondang, P, 2004, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian,P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta,Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan Kesatu, Alfabeta,Bandung.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Suzetta, P. 2007. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala BAPPENAS. www.bappenas.go.id, (pdf).

Thobias Solosa (2012) mengangkat judul *Pendekatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Untuk Mereduksi Asymmetric Information Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua*.

Tjokrowinoto Moeljarto, 1996, *Pembangunan : Dilema dan tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Todaro, Michael P; Smith, Stephen C, 2009, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

Wahab, 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo, Yogyakarta.

Wrihatnolo,Randy.R, dan Riant Nugroho D, 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.

Young, James YL, *E-Government In Asia*, 2003. Times Medisa Private Limited, Singapore

b. Sumber internet

Abbot, J. 2005. *Understanding and Managing the Unknown: The Nature of Uncertainty in Planning*. *Journal of Planning Education and Research* 24: 237-251. (jurnal perencanaan wilayah dan Kota, vol.18/No.3 Desember 2007)

Allmendinger, P. 2002b. *Towards a Post-positivist Typology of Planning Theory*. *Planning Theory* 1(1): 77-99 (jurnal perencanaan wilayah dan Kota, vol.18/No.3 Desember 2007)

Bahagijo, Triwibowo, 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Perkumpulan PRAKASA, LP3ES, Jakarta.

Fritz Verena & Menocal Rocha Alina, September, *Developmental States in the New Millennium: Concepts and Challenges for a New Aid Agenda*, article *Development Policy Review*, 25(5):531-552

Lindblom, Charles. 1959 *The Science of Muddling Through*, Public Administration Review 19, 79-88

Lindblom, Charles, 1979 *Still Muddling, Not Yet Through*, Public Administration Review 39:517-526.

Saraswati, 1989, *Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Teori Perencanaan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung, 17808-19895-1PB.

Simon Herber A, *Behavioral Rational Choice* The Quarterly Journal of Economics, Vol.69, No1 (Feb, 1955), pp.99-118, Stable
 URL:<http://links.jstor.org/sici?=-00335533%28195502%2969%3A%3C99AABMORC%3e2.0co%3b2-A>

c. **Regulasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Dokumen Perencanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Makassar Tahun 2019.

Indikator Ekonomi Makro Kota Makassar Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021.